

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- J.A. Adriani, dikutip dari Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Edisi 10, Penerbit Salemba Empat. Jakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2004.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka otonomi Daerah*, Penerbit FH Unpad, Bandung, 2000.
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- J.B.J.M Ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Mardiasmo, *”Perpajakan”*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2019.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- S.F Marbun dalam Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. JURNAL

Anggreni Wura Aprilyani, dkk, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan)”, *SIMBA Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi)*, Oktober 2020.

Dian Lastiani, “Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 44 Tentang Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Vol. 4 No.1, 2023.

Ronal Ravianto, Amin Purnawan, “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, 2017.

Intan Permatasari, Firman Floranta Adonara, Bhim Prakoso, “Pengenaaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, *Jurnal Action Research Literate*, Vol 8 : 5, Mei 2024.

Junaidi Firrawan, “Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Kayong Utara”, *Jurnal Ekonomi*, 2011.

Winda Meylen Eriza, Hernadi Affandi, “Implikasi UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah, *Rio Law Jurnal*, Vol 5 : 1, 2024.

C. SKRIPSI

Nisa Vera, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

R. Murjiyanto dan Samun Ismaya, “Kepastian Nilai Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22: 3, 2015.

Rahmdhani Arinda, “Analisis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Richard Andre, “Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Badan pendapatan Daerah Kabupaten Pali Tahun 2017”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Pali, 2018.

Ulva Sari Elvira, “Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Undang-undang ini menggantikan Ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No.131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

E. INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring IV” melalui [<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak,>](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak) [20/05/24]

Database Pesisir Selatan, “Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kab. Pessel Dirinci Menurut Jenis Pajak” melalui [<http://103.18.117.183/dataset/target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-daerah-di-kab-pesisir-selatan-dirinci-menurut-jenis-pajak/resource/76a52286-768f-4c95-9525-6f4f99fdae4a,>](http://103.18.117.183/dataset/target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-daerah-di-kab-pesisir-selatan-dirinci-menurut-jenis-pajak/resource/76a52286-768f-4c95-9525-6f4f99fdae4a) [12/05/24].

Fina Pratiwi, “Mengenal Tarif Pajak, Contoh dan Dasar Penerapannya”, melalui [<https://www.harmony.co.id/blog/mengenal-tarif-pajak-contoh-dan-dasar-penerapannya/>](https://www.harmony.co.id/blog/mengenal-tarif-pajak-contoh-dan-dasar-penerapannya/) [29/05/24].

Kompas, “Pendapatan dan Pengeluaran Kabupaten Pesisir Selatan 2023” melalui [<https://www.kompasiana.com/oktapendra2070/663ac3d4de948f5fc06ba452/pendapatan-dan-pengeluaran-kabupaten-pesisir-selatan-2023>](https://www.kompasiana.com/oktapendra2070/663ac3d4de948f5fc06ba452/pendapatan-dan-pengeluaran-kabupaten-pesisir-selatan-2023), [12/05/24].

F. WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Rameita Fiska Lingsih, SH, Kabid PBB dan BPHTB BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan 13 September 2024
Jam 11.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Yanti , SE, Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan 18 September 2024
Jam 10.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Rahmito Azhari SH,.MH,. M.Kn. Notaris/PPAT , 19 September 2024 Jam 10.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Atlina Widya Putri Pengusaha Emas, 25 September 2024 Jam 15.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Fina Eni Fuajjastuti, S.SiT selaku Kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, 21 September 2024 Jam 10.00 WIB